

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persoalan kehidupan manusia berkuat pada rasa menghargai, mencintai, dan menolong sesamanya. Keberagaman masyarakat Indonesia mengajarkan secara turun temurun mengenai nilai-nilai kebajikan kesukarelawanan (volunterisme) pada setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara Indonesia mengenal praktik gotong royong dalam kehidupan komunalnya (Endro, 2016). Bagi Sukarno, gotong royong adalah legitimasi kultural pembentukan negara-bangsa Indonesia. Maka persoalan gotong royong adalah persoalan jiwa. Demikian pula dalam ajaran di dalam kitab suci yang dipenuhi dengan peringatan untuk merawat orang sakit, miskin, yatim piatu, janda, dan para musafir di jalan Tuhan (Kosmin & Ritterband, 1991).

Semangat gotong royong relevan untuk menghadapi persoalan pandemi saat ini. Di tengah pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), beragam elemen bangsa turun tangan berusaha membantu krisis yang melanda. Banyak aksi kedermawanan sosial telah dilakukan berbagai kalangan saat ini, baik perorangan, yayasan, kelompok, maupun perusahaan (Nurdin, 2020). Namun demikian, respons filantropi untuk menangani pandemi Covid-19 pada umumnya berkisar pada urusan mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk membantu kebutuhan darurat masyarakat terkena dampak keras akibat pandemi ini. Hal ini dapat dimengerti dan tentunya sangat bermanfaat, namun itu saja tidak cukup untuk menciptakan perubahan sistemis yang benar-benar didambakan.

Inisiatif individu tidaklah cukup karena berbagai tantangan masalah yang besar dan rumit di lapangan. Selain itu, belum adanya infrastruktur kelembagaan dan kebijakan dari pemangku kepentingan mendorong perlu adanya usaha yang efektif dan terarah dari berbagai komponen menghimpun, menyatukan, dan memperkuat gerak langkah bersama masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial, kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan di negeri ini, terutama masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah semua peradaban di dunia ini

yang tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, namun juga berkembang menjadi masalah sosial-kultural dan politik, terutama di negara Dunia Ketiga (Othman, Isa, Noor, Mohamed, & Ibrahim, 2018).

Mengacu pada pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* Indonesia pada tahun 2015 lalu, fokus pada delapan bidang permasalahan, yakni (1) kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) pendidikan dasar untuk semua, (3) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) kelestarian lingkungan hidup, dan (8) kemitraan global untuk pembangunan memberikan banyak pengalaman dalam perencanaan, penganggaran, dan koordinasi pelaksanaan agenda pembangunan global, khususnya bagi pemerintah (SMERU Research Institute, 2017). Setelah berakhirnya era MDGs, pada tahun 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2016) masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan walaupun telah membawa berbagai kemajuan sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian serta aspek lain yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah tingkat kemiskinan nasional.

Arah perbaikan dari MDGs disempurnakan dengan terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan global. Kesuksesan pencapaian tujuan dan target SDGs akan sangat bergantung dan mengandalkan pada kemitraan global yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga filantropi, akademisi, dan lembaga-lembaga PBB (Abidin, Pangeran, Mayestha, Hapsari, & Nurcahyarini, 2017). Cara-cara inovatif untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan teknis juga sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan SDGs (Abidin et al., 2017).

Berdasarkan hasil riset Filantropi Indonesia dan *Public Interest Research and Advocacy Public (PIRAC)* (Filantropi TV, 2021), pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan kesehatan menempati urutan

teratas dalam fokus bidang yang dikerjakan lembaga filantropi dalam mendukung SDGs. Sementara itu, pendanaan berdasarkan hasil riset tersebut paling banyak diberikan oleh perusahaan berupa dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang seringkali ditunggangi dan beririsan dengan banyak kepentingan perusahaan (Filantropi TV, 2021).

Selain masalah di atas, pada saat ini dunia tengah berduka karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara. Beragam sektor tidak berdaya menghadapi gempuran pandemi ini. Pandemi ini nyatanya telah menyebar dan mengakar pada semua lini dan memaksa warga negara melangkah pada dimensi yang berbeda dari sebelumnya. Covid-19 ini juga berhasil memaksa para tenaga kesehatan, praktisi ekonomi, dan praktisi lainnya bekerja lebih keras menanggulangi dampaknya. Sektor ekonomi berupa penurunan pendapatan menjadi salah satu yang terburuk dan terkena dampak paling banyak di masyarakat dunia. Data yang dirilis World Bank (2020), akibat Covid-19 diperkirakan akan mendorong sekitar 100 juta orang ke dalam kemiskinan yang ekstrem selama tahun 2020.

Konsentrasi orang miskin dengan pendapatan US \$ 1,9/hari dan US \$ 3,2/hari akan terjadi di wilayah termiskin di dunia, terutama di Kawasan Sahara Afrika (Sub-Sahara African/SSA) dan Asia Selatan yang mungkin dapat bertambah 80–85 persen dari total orang miskin. Untuk garis kemiskinan yang lebih tinggi yaitu US \$ 5,5/hari, mayoritas (sekitar 40 persen) dari orang miskin baru dapat terkonsentrasi di Asia Timur dan Pasifik, sekitar sepertiga di SSA dan Asia Selatan, dan masing-masing sekitar 10 persen di Timur Tengah, Afrika Utara, Amerika Latin, dan Karibia (Sumner, Hoy, & Ortiz-Juarez, 2020).

Sementara itu, kasus di Indonesia dari data BPS per Juli 2020, ditemukan fakta bahwa masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal yang berpenghasilan di bawah Rp. 1,8 juta per bulan (US 128 /bulan atau US \$ 4,5 /hari) merupakan yang paling terkena dampak dari mewabahnya pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2020). Apabila dibandingkan dengan data dari Bank Dunia, dengan pendapatan US\$ 4,5/hari, Indonesia berada pada level menengah dengan pendapatan per harinya.

Geliat perekonomian masyarakat menengah ke bawah adalah bagian yang paling merasakan gebukan paling menyakitkan (Nurdin, 2020). Kerusakan sektor ekonomi akibat Covid-19 pada dasarnya disebabkan oleh sifat ketidakpastian dan risiko yang diakibatkan (Modjo, 2020). Ketidakpastian ini disebabkan belum adanya regulasi yang tepat antarsektor untuk mengatur penanganan pandemi dan adanya *panic buying*. Dampak yang paling mengerikan bukan hanya kematian atas virus itu sendiri, melainkan juga kematian akan kemiskinan dan kelaparan akibat banyak tidak mendapatkan pendapatan lagi. Namun demikian, sejatinya pemerintah mendorong beragam stimulus agar dampak pandemi tidak terlalu menghantam masyarakat, terutama sektor ekonomi. Stimulus pandemi ini berupa keringanan pembayaran listrik dan bantuan sosial lainnya. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri menghadapi pandemi dan perlu adanya sinergi antar lini agar pandemi ini segera berakhir.

Di tengah krisis seperti saat ini terjadi pencampuran istilah antara kegiatan amal (*charity*), volunterisme, dan filantropi yang ketiganya mendasari diri pada niat baik meskipun tidak memberikan hasil yang sama. Keduanya memang sama pentingnya, namun sesungguhnya berbeda satu sama lain. Kerelaan untuk memberi dan membantu sesama yang kurang beruntung, serta mempertemukan kebutuhan satu sama lain adalah hal yang fundamental bagi kemanusiaan. *Charity* akan selalu penting namun itu saja tidak cukup. Semangat kerelaan untuk berbagi memunculkan ide gerakan yang sudah lama ada dan berkembang, yakni gerakan filantropi. Faktor yang paling memengaruhi tradisi kedermawanan yang berkembang menjadi filantropi, khususnya di Indonesia adalah semangat keagamaan, kesalehan sosial, dan kebajikan (Latief, 2013a). Menjadi wajar jika gerakan filantropi secara umum di Indonesia digerakkan oleh organisasi keagamaan. Hal itu didasari semangat keagamaan, sebagaimana pandangan ilmu sosial telah menunjukkan bahwa agama membantu dalam menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan (Rogers & Konieczny, 2018).

Gerakan kedermawanan semacam ini secara sosio-kultural telah mengakar dalam sejarah budaya dan ritus keagamaan bangsa Indonesia. Berdasarkan temuan sementara survei yang dilakukan PIRAC (Tim Covid-19 Filantropi, 2021),

pendanaan kegiatan gotong royong menolong sesama selama pandemi Covid-19 paling banyak bersumber dari dana atau pendapatan pribadi (36,46%), disusul donasi publik (33,9%), dana lembaga (23,1%), serta dana perusahaan (6,6%). Sumber pendanaan dari perusahaan menempati peringkat terbawah sangat beralasan karena pada saat yang sama pihak perusahaan harus tetap bertahan menghadapi krisis.

Kondisi nyata bangsa Indonesia yang terpuruk akibat pukulan Covid-19 berupa kesenjangan secara ekonomi, sosial, dan politik, membutuhkan sebuah gerakan gotong royong yang mengakar pada bangsa Indonesia, salah satunya adalah kepatuhan manusia terhadap agama yang dianut. Hubungan antara agama dan masalah sosial saling terkait dengan konsep filantropi, sehingga dapat menjembatani jarak sosial dan distribusi ekonomi masyarakat (Latief, 2013a; Tamin, 2011; Zakaria, Samad, & Shafii, 2013).

Gerakan filantropi di Indonesia dihimpun berawal dari prakarsa sejumlah individu dan lembaga/organisasi nirlaba yang sejak 2003 merintis jaringan prakarsa penguatan filantropi di Indonesia, dan telah sepakat untuk melanjutkan dan melembagakan kegiatan bersama mereka dalam suatu wadah perkumpulan. Untuk memajukan kepentingan para pelaku filantropi, baik yang berasal dari sektor pemberi, pengelola/penyalur/perantara, maupun penerima bantuan, atas dasar prinsip kemitraan, kesetaraan, keberagaman, keadilan, universalitas filantropi dan kebangsaan Indonesia.

Gerakan filantropi seperti di atas dapat mengisi kekosongan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Permasalahan yang timbul di masyarakat tidak mungkin dapat diselesaikan dengan hubungan vertikal saja, namun juga membutuhkan hubungan horizontal dengan sesama. Para pakar neoliberalisme berpendapat bahwa keadilan sosial dan redistribusi sumber daya untuk mengatasi kemiskinan tidak harus dicapai melalui hubungan langsung antara negara dan masyarakat sipil (Kapur, 2004; Milanović, 2004).

Kekuatan filantropi dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan religiositas warga negaranya (Barman, 2017; Ruiters & De Graaf, 2006; Schofer & Fourcade-Gourinchas, 2001). Dengan melampaui pertimbangan budaya, para ahli sosiologi menggunakan perspektif makro untuk memberikan perhatian pada berbagai

dimensi beragam konfigurasi politik bangsa. Dalam perspektif makro, filantropi dihasilkan dari "cara masyarakat diorganisasikan, bagaimana mereka mengalokasikan tanggung jawab sosial, dan seberapa banyak keterlibatan dan partisipasi yang mereka harapkan dari warga negara" (Anheier & Salamon, 1999, hal. 43; Barman, 2017). Sementara itu, dalam perspektif mikro, filantropi tidak hanya memberikan perhatian kepada individu sebagai pendonor, namun juga melihat keputusan mereka untuk memberi sebagaimana dibentuk oleh jaringan dan norma-norma konteks sosial lokal di mana mereka hidup. Perspektif ini telah menekankan sifat relasional dari pemberian amal bahwa perilaku filantropis bergantung pada keterikatan mereka dalam hubungan sosial yang dinamis (Barman, 2017).

Gerakan filantropi dalam perspektif mikro tidak hanya memberikan perhatian kepada individu sebagai pendonor, namun juga melihat keputusan mereka untuk memberi sebagaimana dibentuk oleh jaringan dan norma-norma konteks sosial lokal di mana mereka hidup. Perspektif ini telah menekankan sifat relasional dari pemberian amal bahwa perilaku filantropi bergantung pada keterikatan mereka dalam hubungan sosial dinamis dan berubah (Barman, 2017).

Negara menaruh harapan besar partisipasi warga negara terkait tanggung jawab sosial kepada sesamanya. Komponen bangsa harus mampu berkolaborasi dalam semangat filantropi dengan menghidupkan kembali kebersamaan dalam aksi-aksi kebaikan bagi sesama umat manusia. Gerakan filantropi dalam praktiknya dapat dilakukan secara kultural untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, kemanusiaan, dan sosial warga negara. Filantropi dapat menjadi sebuah potensi besar bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Gerakan semacam ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Gerakan filantropi membutuhkan semangat dari warga negara dengan inisiatif mendorong individu untuk memberikan waktu dan komitmennya kepada komunitas di lingkungan dimana mereka tinggal (Daly, 2011). Namun demikian, pembangunan ekonomi yang memasukkan pola pikir masyarakat industrial mengakibatkan tekanan dan ketegangan pada pola pikir masyarakat agraris yang sudah ada, sehingga semangat gotong royong sebagai akar filantropi ditengarai mulai meredup. Praktik gotong royong yang masih tersisa

umumnya terkait dengan musibah atau bencana alam, seperti misalnya “*tetulang layat*” yang bisa jadi bukan didorong oleh semangat gotong royong, melainkan oleh kepatuhan pada ajaran agama (Endro, 2016)

Apabila dilihat dari dimensi kewarganegaraan yang dikemukakan Osler dan Starkey (2005), yakni kewarganegaraan sebagai status, rasa, dan praktik, maka gerakan cinta kasih dan mencintai sesama dibalut filantropi berada pada dimensi rasa dan praktik kewarganegaraan. Kewarganegaraan sebagai rasa merupakan perasaan memiliki seorang warga negara terhadap negaranya (*sense of belonging*). Derajat rasa terhadap bangsa dan negara bisa bervariasi tiap warga negara dan negara mengusahakan beragam cara agar warga negara memiliki rasa memiliki terhadap bangsa dan negara melalui identitas dan simbol yang melekat. Kewarganegaraan sebagai praktik mengacu pada kesadaran diri sebagai individu yang hidup dalam hubungan dengan orang lain yang berpartisipasi secara bebas dalam masyarakat dan bergabung dengan orang lain untuk tujuan politik, sosial, budaya atau ekonomi (Osler & Starkey, 2005).

Dari pandangan di atas, kontribusi warga negara secara individu berkembang membentuk komunitas dan institusi yang melembaga secara ajek dalam gerakan filantropi dirumuskan menjadi gerakan sosiokultural kewarganegaraan. Gerakan sosiokultural diawali dari teori sosiokultural yang muncul dalam psikologi untuk melihat kontribusi penting yang dibuat masyarakat untuk perkembangan individu (Cherry, 2019). Teori ini menekankan interaksi antara orang-orang yang sedang berkembang dan budaya di mana mereka tinggal. Filantropi yang dipahami dalam perspektif ideologi negara (Pancasila dalam konteks Indonesia), ekonomi, sosiologi, budaya, dan politik diramu sedemikian menjadi kajian pendidikan kewarganegaraan baik dalam dimensi akademik maupun sosiokultural.

Hubungan filantropi dengan orang miskin, baik secara langsung dengan individu maupun melalui kemitraan, terlepas dari lokasi di mana mereka tinggal dianggap sebagai konseptualisasi baru negara dan masyarakat sipil. Oleh karena itu para pakar neoliberalisme berpendapat bahwa keadilan sosial dan redistribusi sumber daya untuk mengatasi kemiskinan tidak harus dicapai melalui hubungan langsung antara negara dan masyarakat sipil (Kapur, 2004; Milanović, 2004).

Politik liberalisme memberi penekanan kuat pada individu. Sebagian besar hak melibatkan kebebasan yang melekat pada setiap orang. Namun, konsep politik liberal tentang saling menghormati, disebut sebagai *civic respect* (rasa hormat warga negara) sesuai untuk mengatur hubungan politik publik dan kebebasan warga negara dalam masyarakat demokratis dan majemuk (Neufeld & Davis, 2010).

Konsep pendidikan harus bertujuan memastikan bahwa siswa, sebagai warga negara masa depan, belajar berinteraksi dengan warga negara lain berdasarkan rasa hormat warga negara (Neufeld & Davis, 2010). Rasa menghormati dimulai dari rasa saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Rasa tersebut tidak tertanam apabila masih ada “*gap empowerment*” antara siswa kaya dan miskin. Dengan demikian, diperlukan kerangka bagi kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan empati, emansipasi sosial, kasih sayang, dan motivasi afektif (Swalwell, 2015), karena salah satu atribut dari masyarakat sipil yang berfungsi dengan baik adalah warga negara (dalam hal ini siswa) diberi informasi tentang masalah-masalah komunitas, mempertanyakan sistem ketidaksetaraan, mengadvokasi perubahan sosial, dan berpartisipasi dengan orang lain dalam berbagai cara untuk bekerja demi kebaikan bersama (Hatcher & Studer, 2015; Sievers, 2010).

Aksi kebaikan belum ditampilkan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih mengalami beberapa kendala. Widiatmaka (2016, hal. 193) mengatakan bahwa “kendala yang dialami Pendidikan Kewarganegaraan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih mengedepankan aspek kognitif sehingga tujuan untuk menciptakan peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab masih belum terealisasi”. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum merespons perubahan sosial sehingga menggeser nilai rasa hormat terhadap masalah di sekitarnya, kurang empati terhadap siswa lain, dan cenderung menjadi individualis (Karliani, Kartadinata, Winataputra, & Komalasari, 2019). Padahal kekuatan filantropi terletak pada kohesi sosial warga negara untuk menghimpun diri untuk tujuan publik dalam mengatasi masalah sosial. Sangat penting bagi negara untuk menyadari peran penting masyarakat sipil dan filantropi untuk membangun

ketahanan masyarakat (Charities Aid Foundation, 2020). Pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat sipil dan filantropi dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan melengkapi upaya pembangunan berkelanjutan (Charities Aid Foundation, 2020).

Para guru memainkan peran penting mempersiapkan siswa berpartisipasi dalam peristiwa sosial politik secara kritis, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan multidimensi untuk abad ke-21 (Wong, Lee, Chan, & Kennedy, 2017). Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan harus merumuskan sumber bahan belajar yang "memberikan siswa dengan kesempatan untuk mempelajari masalah sosial dan organisasi nirlaba ..." (McDougle, McDonald, Li, McIntyre Miller, & Xu, 2017, hal. 331). Pengalaman di Amerika, kemitraan dengan yayasan filantrop dapat membuka kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi dan pengamatan siswa terhadap proses pengambilan keputusan dalam kerja sosial (McClendon, Kagotho, & Lane, 2016).

Berdasarkan pada sekelumit permasalahan di atas, perlu dilakukan upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia serta usaha pembentukan warna negara yang aktif. Warga negara aktif belum tentu merupakan warga negara yang baik, karena bisa saja tidak mengikuti aturan atau berperilaku dengan cara tertentu. Seringkali pada praktiknya warga negara menentang aturan dan struktur yang ada, meskipun umumnya akan tetap dalam batas-batas proses demokrasi dan tidak terlibat dalam tindakan kekerasan.

Menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana peta dinamika basis gerakan filantropi dan pengembangan filantropi sebagai upaya perwujudan filantropi keadilan sosial yang dapat membantu terwujudnya masyarakat yang lebih adil di tengah kondisi akibat pandemi. Beberapa hal yang melatarbelakangi, yakni *pertama*, kondisi di Indonesia saat ini, di mana sudah dua tahun pandemi Covid-19 melanda namun orang yang terinfeksi semakin tinggi dan sudah melampaui satu juta. *Kedua*, posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia versi Charities Aid Foundation (2019), tampak pada gotong-royong masyarakat menolong sesama selama pandemi Covid-19. *Ketiga*, ketika pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan bantuan sosial dan penanganan pandemi, di sisi lain

warga negara lebih dulu berinisiatif membantu. *Keempat*, inisiatif dan solidaritas sosial masyarakat Indonesia penting untuk direkam sebagai sebuah sejarah bagaimana bangsa ini berupaya keluar dari pandemi Covid-19. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh kontribusi filantropi terhadap pengembangan kajian teoretis maupun praktis bagi pengembangan kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, secara umum dapat dirumuskan masalah penelitian bagaimana penguatan filantropi untuk mengembangkan dimensi sosio kultural kewarganegaraan? Sementara itu secara khusus rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi Gerakan Filantropi di Indonesia dalam membangun dimensi sosiokultural kewarganegaraan?
2. Bagaimana hubungan antara Gerakan Filantropi di Indonesia dengan pemerintah dan warga negara dalam membangun dimensi sosiokultural kewarganegaraan?
3. Bagaimana faktor determinatif terhadap pengembangan Gerakan Filantropi di Indonesia dalam membangun dimensi sosiokultural kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian untuk menganalisis pengembangan Gerakan Filantropi untuk memperkuat dimensi sosio-kultural kewarganegaraan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh para pengguna, pemerhati dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan semangat Gerakan Filantropi dalam memperkuat dimensi sosiokultural kewarganegaraan di Indonesia

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diungkap di atas maka secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut di bawah ini.

1. Mendeskripsikan konstruksi Gerakan Filantropi dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan.

2. Mendeskripsikan pola hubungan Gerakan Filantropi Indonesia dengan pemerintah dan warga negara dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan
3. Mendeskripsikan faktor determinatif terhadap pengembangan Gerakan Filantropi di Indonesia dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat/Signifikansi Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian dapat memperkaya pengembangan keilmuan pada dimensi kewarganegaraan dan meneguhkan pendidikan kewarganegaraan sebagai *an integrated system of knowledge* (Hartoonian, 1992), *synthetic discipline* (Somantri, 2001), *interdisciplinary, multidimensional, scientific boundary line*, dan atau kajian konseptual sistemis (Sapriya, 2007; Somantri & Winataputra, 2017; Winataputra, 2001, 2015).

Gerakan Filantropi dapat mengisi kekosongan hubungan antara pemerintah dengan warga negara karena permasalahan yang timbul di masyarakat tidak mungkin dapat diselesaikan dengan hubungan vertikal saja, namun membutuhkan hubungan horizontal dengan sesama warga negara. Temuan tentang Gerakan Filantropi sebagai jembatan hubungan antara negara (pemerintah) dengan warga negara dengan pola pemberdayaan berbasis masyarakat dapat memperkaya dimensi sosiokultural kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan (*community civic education*). Dengan demikian, secara akademik-teoretis dapat melahirkan formulasi baru kajian pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang meliputi gerakan sosiokultural kewarganegaraan melalui Gerakan Filantropi sebagai aksi sosial dan pemberdayaan warga negara.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi Kebijakan

Hasil penelitian filantropi sebagai penguat dimensi sosiokultural kewarganegaraan diharapkan menjadi salah satu faktor penguat bagi kebijakan tentang pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas tidak hanya dalam lingkup persekolahan saja.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif sudut pandang atau solusi bagi pemerintah melalui pendidikan kewarganegaraan untuk mempertimbangkan Gerakan Filantropi yang berkembang di Indonesia sebagai sebuah gerakan sosiokultural kewarganegaraan di Indonesia untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan perumusan kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya aksi kedermawanan melalui filantropi warga negara Indonesia yang memiliki akar sejarah sosiokultural yang kuat dengan nilai gotong royong serta karakter warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 yang terdiri dari lima bab sebagai berikut di bawah ini.

Bab I pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian mengenai gerakan filantropi di dalam masyarakat Indonesia, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur disertasi itu sendiri.

Bab II kajian teori. Bab ini membahas mengenai konsep dan teori yang mendukung yang digunakan dalam penelitian mulai dari literasi kemanusiaan, kajian filantropi, fakta sosial, solidaritas sosial, hubungan antara modal sosial dan masyarakat sipil, serta dimensi sosio-kultural kewarganegaraan.

Bab III metodologi penelitian. Bab ini mengulas perihal metodologi yang digunakan dalam proses penelitian meliputi lokasi dan objek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan isu etik terkait penelitian

Bab IV temuan dan pembahasan. Bab ini mengulas gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan terkait (1) konstruksi gerakan filantropi indonesia dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan, (2) pola

hubungan antara warga negara, filantropi, dan negara dalam membangun sosiokultural kewarganegaraan, dan (3) faktor-faktor determinatif terhadap pengembangan gerakan filantropi di Indonesia dalam membangun dimensi sosiokultural kewarganegaraan, serta temuan penting yang ditemukan dalam penelitian ini.

Bab V kesimpulan. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran yang ditawarkan.